

Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bengkulu)

Influence Of Inflation, Exchange Rate And Number Of Taxable Businesses On The Receipt Of Value Addition Tax (Study At The Regional Office Of DJPB Bengkulu Province)

Karona Cahya Susena¹, Darwan Hamid², Nenden Restu Hidayah³

^{1,2)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ darwanhamid@gmail.com

How to Cite :

Susena, K, C., Hamid, D., Hidayah, N, R. (2025) Influence Of Inflation, Exchange Rate And Number Of Taxable Businesses On The Receipt Of Value Addition Tax (Study At The Regional Office Of DJPB Bengkulu Province) . Journal of Business Management. 1(2). DOI: <https://doi.org/10.70963/jbusman.v1i2>

ARTICLE HISTORY

Received [13 May 2025]

Revised [15 May 2025]

Accepted [17 May 2025]

KEYWORDS

Inflation, Exchange Rate, Amount Of Taxable Entrepreneurs, VAT.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai dianggap penting bagi pemasukan negara karena merupakan penyumbang jenis pajak terbesar kedua. Pajak Pertambahan Nilai bersinggungan langsung dengan perilaku masyarakat dalam melakukan konsumsi atas barang dan jasa yang mempunyai keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi makro suatu negara, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan variabel makro-ekonomi berupa inflasi dan nilai tukar rupiah. Selain itu, pran internal guna memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga perlu diperhatikan seperti jumlah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang. Data inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang digunakan merupakan jenis data sekunder dari tahun 2010-2014. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian *explanatory research* dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Berdasarkan variabel independen berupa data inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak sedangkan untuk variabel dependen menggunakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka teknik analisis yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji hipotesis t dan F, variabel independen mempunyai pengaruh parsial dan simultan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 51,3% oleh variabel independennya.

ABSTRACT

Value Added Tax is a tax imposed on the consumption of goods and services within the customs area. The contribution of Value Added Tax is considered important for state income because it is the second largest contributor to this type of tax. Value Added Tax is directly related to people's behavior in consuming goods and services which is closely related to the macroeconomic conditions of a country, therefore this research uses macro-economic variables in the form of inflation and the rupiah exchange rate. Apart from that, internal roles to maximize Value Added Tax revenues also need to be considered, such as the number of Taxable Entrepreneurs who have the obligation to collect, deposit and report Value Added Tax payable. Data on inflation, rupiah exchange rate and number of Taxable Entrepreneurs used are secondary data from 2010-2014. This type of research uses explanatory research using a quantitative approach method. Based on the independent variables in

the form of inflation data, the rupiah exchange rate and the number of Taxable Entrepreneurs, while the dependent variable uses Value Added Tax revenues, the analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the *t* and *F* hypothesis tests, the independent variable has a partial and simultaneous influence on the dependent variable. Based on the Adjusted *R* Square value, it shows that the dependent variable can be explained by 51.3% by the independent variable.

PENDAHULUAN

Pembangunan di segala bidang diperlukan adanya suatu anggaran sebagai penyokong utama. Komponen dalam anggaran dihitung dari penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah. Sumber penerimaan negara dari pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berikut ini sumbangan dari berbagai jenis pajak untuk APBN kurun waktu 2004-2014:

Gambar 1. Penerimaan Perpajakan Tahun 2004-2014 Sumber: Nota Keuangan Tahunan (2015)



Bedasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa penerimaan PPN terus meningkat dan signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah PPh dengan memberikan kontribusi sekitar 30% dari penerimaan pajak. PPN merupakan pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan barang dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabean. Pajak yang dikenakan atas setiap nilai yang dapat diidentifikasi dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23). Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat diasumsikan bahwa PPN mempunyai hubungan erat dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan vital bagi keberlangsungan negara maka dari itu diperlukan faktor internal dan eksternal untuk menjaga kestabilan kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan yang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan konsumsi yaitu PPN tetap selalu terjaga penerimaannya.

Faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan ekonomi makro negara. Fluktuasi ekonomi makro dapat menimbulkan dampak buruk bagi kegiatan perekonomian. Jika fluktuasi ekonomi tersebut terus berlangsung maka akan dapat menurunkan daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang akan berdampak pula pada penerimaan PPN. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini seperti tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah.

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Case dan Fair, 2004:58). Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009:211). Tingkat inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN. Masalah inflasi mendapat perhatian masyarakat karena mencapai 8,36% pada tahun 2014 yang disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2015).

Variabel ekonomi makro selanjutnya adalah kondisi nilai tukar, yang merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Murni, 2006:244). Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Keadaan tersebut secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi (Edalemen, 2000:3). Banyak dampak negatif jika hal ini terus berlanjut, diantaranya berdampak pada perusahaan dalam negeri yang dalam kegiatan usahanya melibatkan ekspor impor yang akan berlanjut pada harga jual ahir yang ditawarkan kepada konsumen akan semakin tinggi sehingga daya beli konsumen akan turun. Hal tersebut akan melebar kepada menurunnya penerimaan PPN.

Faktor internal untuk menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan. Diperlukan kerja sama antara berbagai pihak terkait. Ditnamkan untuk wajib pajak untuk tertib dan patuh dalam membayar PPN dan dari kalangan DJP sebagai pembuat ketentuan perpajakan. Apabila dikaji dari sisi wajib pajak dalam hal pengaruhnya terhadap penerimaan PPN salah satu utamanya adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, meyetor dan melaporkan PPN yang terutang (Undang Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Semakin banyak PKP yang patuh dalam menjalankan kewajiban PPN nya maka penerimaan PPN akan semakin meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan penerimaan PPN tidak sesuai seperti yang diharapkan. Variabel inflasi, nilai tukar dan jumlah PKP mempunyai keterkaitan erat atas hal tersebut. Ketiga variabel tersebut merupakan data yang bersifat fluktuatif, secara langsung maupun tidak langsung kefluktuatifan ketiganya dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian ini dirasa penting karena mengetahui begitu berperannya PPN sebagai sumber penerimaan, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana ketiga variabel diatas mempengaruhi penerimaan PPN agar kedepannya negara dapat mengidentifikasi sebab tidak tercapainya atau turunnya penerimaan PPN dan untuk diminimalisir hal- hal yang dapat mempengaruhi penurunan PPN dan memaksimalkan hal-hal yang dapat menaikkan penerimaan PPN.

Penelitian kali ini dilakukan di Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah di Bengkulu. Ditinjau dari segi letak geografisnya yang berada di tengah perkantoran dan daerah industri. Bengkulu adalah provinsi yang berada di pulau sumatera, Indonesia dengan ibu kota di kota bengkulu penduduknya sebagian besar merupakan masyarakat modern yang banyak melakukan kegiatan jual – beli sehingga sedikit banyak dapat merepresentasikan untuk dijadikan wilayah penelitian ini.

LANDASAN TEORI

Perpajakan Secara Umum

Pajak menurut Brotodiharjo dalam Sukardji (2014:1) “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan menurut Undang Undang No. 28 tahun 2007 tentang KUP pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesimpulan dari berbagai pengertian pajak adalah :

- Iuran rakyat yang diberikan kepadanegara.
- Bersifat memaksa
- Dikenakan kepada orang pribadi ataubadan
- Dilandasi peraturan Undang Undang
- Tidak mendapat imbalan secaralangsung
- Digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Dan Pertambahan Nilai

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat seperti mata rantai di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN bukan merupakan pajak berganda melainkan pajak terutang yang dihitung dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan (PM) atas Pajak Keluaran (PK) nya (Sukardji, 2014 : 29)

Inflasi

Menurut Cowt Hrey dalam Pasaribu (2011:21) inflasi adalah suatu keadaan dari nilai uang turun terus menerus dan harga naik terus menerus. Sedangkan menurut Hawtry, inflasi adalah suatu keadaan karena terlalu banyak uang beredar. Menurut Boediono (1985:161) inflasi adalah kecenderungan dari harga umum untuk menaik secara umum dan terus menerus atau suatu keadaan dimana senantiasa turunnya nilai uang .Berdasarkan beberapa pengertian diatas , dapat diartikan bahwa inflasi adalah sebuah keadaan dalam suatu negara dimana terjadi penurunan nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan daya beli masyarakat akan turun. mengakibatkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan daya beli masyarakat akan turun.

Nilai Tukar

Nilai tukar menunjukkan seberapa banyak rupiah yang akan digunakan untuk dipersamakan dengan mata uang negara asing. Menurut Kuncoro (2001 : 54), nilai tukar rupiah adalah nilai tukar sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US Dollar dengan ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap kurs.Bedasarkan teori paritas daya beli menyatakan penurunan daya beli mata uang domestik (kenaikan harga barang dalam negeri) akan diiringi dengan depresiasi mata uang. Depresiasi berakibat pada kenaikan tingkat harga di dalam negeri secara umum dan berakibat pada menurunnya daya beli konsumen dan dapat berakibat pada menurunnya penerimaan PPN (Pasaribu, 2011:26).

Pengusaha Kena Pajak

Bedasarkan Undang Undang PPN 1984 pasal 1 angka 15 dalam Sukardji (2014:170) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak bedasarkan Undang Undang PPN 1984. Pengertian ini masih akan dirangkai dalam pasal 14 ayat (1) yang akan menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 “Definisi PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak, dalam satu tahun buku atau bagian tahun buku memperoleh peredaran usaha atau penerimaan usaha melebihi batas maksimum peredaran/penerimaan usaha pengusaha kecil yang berlaku pada saat ini adalah dalam satu tahun buku tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00”.

METODE PENELITIAN

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2009 : 74) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal. Deteksi uji normalitas ditentukan dengan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plot*.

Uji Multikolonieritas

Dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF ≤ 10 dan TOL $\geq 0,1$ maka dapat dikatakan bebas multikolonieritas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Memperhatikan pola titik pada *scatterplot*, jika pola titik yang dihasilkan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka terbebas dari gejala heterokedastisitas, yang artinya tidak terjadi kesamaan varians dariresidual satu pengamatan ke yang lain.

Uji Autokorelasi

Menggunakan uji Durbin Watson (D-W) yang dimana menguji apakah dalam model regresii terjadi kesalahan pengganggu pada periode yang satu ke yang sebelumnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Digunakan jika terdapat variabel independen yang lebih dari satu. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + p1X1 + p2X2 + p3X3 + e$$

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya. Dengan mengidentifikasi t hitung atas t tabel. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka terjadi pengaruh secara parsial.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Untuk melihat apakah semua variabel independennya mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Dengan mengidentifikasi F hitung atas F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka terjadi pengaruh secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

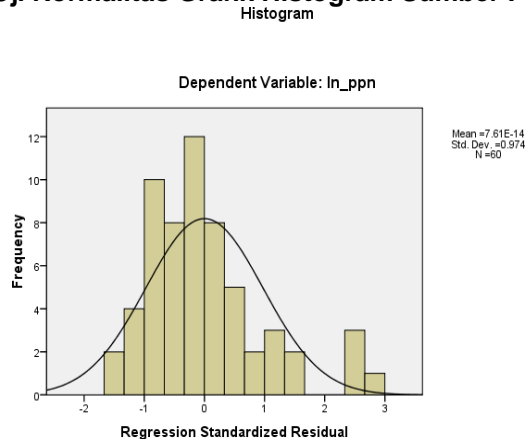
Mengukur sejauh mana variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Uji Normalitas

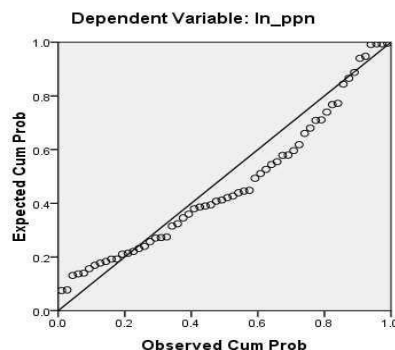
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram Sumber : Data Diolah (2015)



Berdasarkan gambar histogram diatas, menunjukkan bahwa data penelitian bersifat normal karena dapat dilihat dalam grafik membentuk garis normal.

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Grafik Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Diolah (2015)

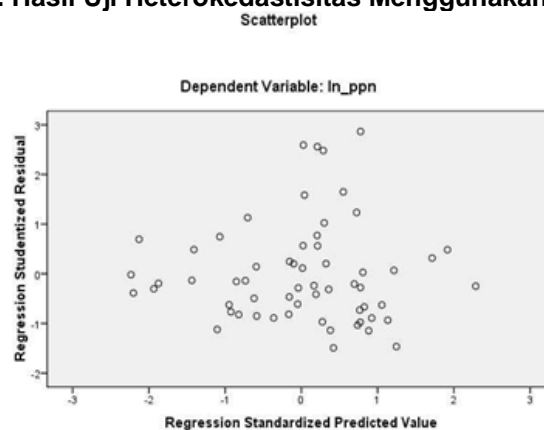
Berdasarkan gambar grafik normal probability plot diatas, menunjukkan bahwa data penelitian bersifat normal karena dapat dilihat dalam grafik titik bergerak mengikuti garis diagonal. Berdasarkan kedua hasil uji normalitas diatas, maka dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini bersifat normal.

Hasil Uji Multikolonieritas**Tabel 1. Hasil Uji Multikolonieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	lnf	.976	1.025
	ln_nilaitkr	.210	4.770
	ln_pkp	.212	4.722

Sumber : Data Diolah (2015)

Bedasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10 dan TOL \geq 0,1 yang berarti seluruh variabel independen dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolonieritas.

Hasil Uji Heterokedastisitas**Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Scatterplot**

Sumber : Data Diolah (2015)

Gambar diatas menunjukkan titik data menyebar tidak membentuk pola diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi**Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Durbin-Watson
1	1.719

Sumber : Data Diolah (2015)

Bedasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai durbin-watson sebesar 1,719 dengan nilai tabel diketahui dU = 1,6889. Syarat agar terbebas dari autokorelasi, nilai durbin-watson harus berada diantara angka dU dan 4-dU. Nilai 4-dU = 2,3111. Dapat diketahui bahwa nilai durbin-watson 1,719 berada diantara 1,6889 dan 2,3111 hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Liner Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	83.764	17.375		4.821	.000
lnf	.215	.080	.247	2.687	.009
ln_nilaitkr	-2.119	.837	-.502	-2.531	.014
ln_pkp	13.190	2.414	1.078	5.463	.000

Sumber : Data Diolah (2015)

Bedasarkan tabel tertulis diatas maka menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 83,764 + 0,215X_1 - 2,119X_2 + 13,190X_3 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	.538	.513	.34610

Sumber : Data Diolah (2015)

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan PPN

Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa inflasi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN, hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudi (2009), Salawati (2008), dan Carare (2008). Hal ini disebabkan karena jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka akan meningkatkan harga jual yang dimana harga jual tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Meningkatnya DPP PPN akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan PPN. Sebab itulah inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Penerimaan PPN

Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai tukar berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan PPN, hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saepudin (2008), Utari (2003). Hal ini disebabkan karena jika terjadi kenaikan nilai tukar (melemah terhadap dollar), maka akan mengakibatkan harga jual barang dan jasa mengalami kenaikan harga, tingkat perubahan harga tersebut akan mempengaruhi daya beli konsumen yang menurun dan akan berlanjut terhadap penurunan PPN dalam negeri, selain itu dengan adanya peningkatan nilai tukar mengakibatkan biaya produk untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat pula dan akan meningkatkan harga jual akhir, maka daya beli konsumen akan menurun dan berakibat pada menurunnya penerimaan PPN. Sebab itulah nilai tukar mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN

Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah PKP berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN, hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masithoh (2011). Hal ini disebabkan karena PKP merupakan wajib pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak. Mengingat PKP mempunyai kewajiban terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN, maka semakin banyak jumlah PKP terdaftar maka akan semakin banyak PPN yang akan dihimpun dan disetorkan. Sebab itulah jumlah PKP mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah PKP Secara Simultan Terhadap Penerimaan PPN

Bedasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saepudin (2008), Utari (2003), Salawati (2008), Wahyudi (2009) dan Masithoh (2011). Hal ini dikarenakan penerimaan pajak ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal meliputi kebijakan di bidang perpajakan seperti pelaksanaan ekstensifikasi dimana berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang dalam hal PPN adalah penambahan jumlah PKP. Faktor eksternal meliputi keadaan ekonomi makro negara seperti inflasi dan nilai tukar, jika inflasi dan nilai tukar dalam kondisi yang terkendali maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan memberi dampak yang baik kepada penerimaan PPN yang merupakan pajak atas konsumsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan. Membuktikan bahwa hipotesis H1 yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan

PPN diterima.

1. Nilai tukar berpegaruh terhadap penerimaan PPN secara negatif dan signifikan. Membuktikan bahwa hipotesis H2 yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN diterima.
2. Jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan. Membuktikan bahwa hipotesis H3 yang menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN diterima.
3. Inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Membuktikan bahwa hipotesis H4 yang menyatakan inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN diterima.

Saran

- 1) Bagi pemerintah, agar dapat menstabilkan tingkat inflasi dan nilai tukar. Dengan cara menambah hasil produksi, tidak mengimpor barang dari negara yang sedang mengalami inflasi dan nilai tukar yang tinggi serta menerapkan harga maksimum.
- 2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, untuk melakukan optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dengan menjangkau lebih banyak wajib pajak yang dapat dikukuhkan agar semakin banyak wajib pajak yang dapat terjangkau sebagai PKP dan memaksimalkan penerimaan PPN.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, memperhatikan variabel ekonomi makro lainnya yang memiliki peran terhadap penerimaan PPN, seperti misalnya Produk Domestik Bruto dan harga Bahan Bakar Minyak agar dapat lebih memaksimalkan atau meminimalisir faktor yang menyebabkan turun atau naiknya penerimaan PPN.
- 4)

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Hidayat. 2015. *Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya*, diakses pada 21 September 2015 dari www.kemenkeu.go.id
- Anonim. 2015. *Laju Inflasi Dari Tahun Ke Tahun*, diakses pada 21 September 2015 dari www.bps.go.id
- Asep, Hermawan. 2009. *Penelitian Bisnis : Paradigma Kuantitatif*. Jakarta : Grasindo
- Boediono, D. 1985. *Ekonomi Alone*. Yogyakarta : BPFE
- Case dan Fair. 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta : PT. Indeks
- Edalmen. 2000. *Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah : Faktor Penyebab, Dampak dan Upaya Pengendaliannya*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara Jurnal Ekonomi Vol. 01
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Manajemen Keuangan Internasional Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global Edisi Kedua*. Yogyakarta : BPFE
- Murni, Asfia. 2006. *Ekonomika Makro*. Jakarta : PT. Refika Aditama
- Pasaribu, Benny. 2011. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Sektor Industri Barang Konsumsi Di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks
- Saepudin. 2008. *Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UINSyarif Hidayatullah
- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Susena, K. (2015). POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BENGKULU. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 3(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i1.98>
- Utari, Woro. 2003. *Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra
- Wahyudi, Eddi. 2009. *Dampak Fluktuasi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak*. Bogor : Institut Pertanian Bogor Jurnal Ekonomi Vol. 6 No. 1
- Wijayanti, Amalia. 2015. *Analisis Penerimaan Pajak Indonesia : Pendekatan Ekonomi Makro*. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis